

PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Novica Indriaty

Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This research aimed to analyze the influence of debt ratio, financial performance, profitability, population and audit opinion on financial distress of the local government probability in Indonesia. Referring to PP No.30 Tahun 2011 about regional loans, local government stated as having financial distress if the government are unable to repay loans both in principal or interest, by using Debt Service Coverage Ratio (DSCR) indicator, at least 2,5 (two point five). The population of this research is all local financial statement (LPKD) from state audit bureau of Indonesia (BPK RI) and annual statement of statistic central committee (BPS) from regency government in 2008-2014. 641 sample chosen by using purposive sampling method. Panel data regression which supported by computer software for Eviews 9.9 version used as data analysis. Panel data regression consists of 3 methods that are Common Effect, Fixed Effect and Random Effect where chosen by Chow Test, Hausman Test and Lagrange Multiplier Test. The result of this research show that the chosen model is Random Effect where STL/R, PM and audit opinion significantly affect on financial distress of local government probability in Indonesia.

Keywords: *financial distress, financial ratio, financial performance ratio, probability ratio, audit opinion, panel data regression.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio hutang, kinerja keuangan, profitabilitas, jumlah penduduk dan opini audit terhadap probabilitas pemerintah daerah di Indonesia mengalami *financial distress*. Mengacu pada PP No.30 Tahun 2011 tentang pinjaman daerah, pemerintah daerah dikatakan *financial distress* jika tidak mampu mengembalikan pinjaman baik pokok maupun bunga pinjamandengan indikator *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Populasi penelitian ini mencakup seluruh laporan keuangan daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) pemerintah daerah kabupaten dan kota tahun 2008-2014. Terpilih sebanyak 641 sampel dengan menggunakan *purposive sampling method*. Analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan *software* komputer untuk statistik *Eviews* versi 9.9. Regresi data panel terdiri dari 3 model yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect yang dalam pemilihannya dilakukan tiga uji -*Chow Test, Hausman Test dan Lagrange Multiplier Test*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang terpilih adalah *Random Effect* dimana STL/R, PM dan Opini Audit secara signifikan mempengaruhi probabilitas pemerintah daerah di Indonesia mengalami *financial distress*.

Kata kunci : *financial distress, rasio keuangan, rasio kinerja keuangan, rasio profitabilitas, opini audit, regresi data panel*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah lahir di tengah gejolak sosial yang begitu massif pada tahun 1999, dengan diawali krisis ekonomi yang melanda Indonesia sekitar tahun 1997. Penerapan otonomi daerah merupakan langkah penting dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus secara sendiri segala keperluan pemerintah dan masyarakat sekitar sesuai perundang-undangan. Namun, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah hingga kini perlu dipertanyakan.

Dilansir dari majalah ilmiah UNIKOM, Surtikanti mengungkapkan bahwa rapat teknis pra raker yang diikuti oleh para Asisten 1 dan Biro terkait pemerintah provinsi seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Anyer, Provinsi Banten pada 25 Mei 2007, berhasil menginventarisasikan delapan masalah yang mengemuka dalam praktek penyelenggaraan otonomi daerah. Dua dari

permasalahan tersebut diantaranya ialah perimbangan keuangan dan APBD. Prayitno, Kepala Divisi Pengembangan Jaringan SEKNAS FITRA periode sebelumnya, menyebutkan kondisi keuangan daerah semakin kritis dan mengkhawatirkan. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai akan mengantarkan mereka menuju jurang kebangkrutan. Pada tahun 2012 terdapat 291 daerah yang memproyeksikan belanja pegawai lebih dari 50 persen dimana jumlah ini meningkat signifikan sebesar 135 persen dibandingkan dengan tahun 2011 yang sudah mencapai 124 daerah. Dari 291 daerah tersebut terdapat 11 kab/kota yang memiliki belanja pegawai 70 persen ke atas dengan nilai tertinggi sebesar 76,7 persen sebagaimana ditempati oleh Kota Langsa – NAD (sumber : Ringkasan APBD 2012, DJPK). Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pemerintah daerah untuk memberikan pemenuhan pelayanan publik berkualitas sebagaimana mandat otonomi daerah tidak akan pernah mampu diwujudkan, karena sisa anggaran yang masih tersedia untuk belanja program kegiatan hanya sebesar 9 persen hingga 14 persen.

Financial distress pada sektor publik didefinisikan sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan (Jones dan Walker, 2007; ACIR, 1985). Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja keuangan yang baik jika mereka dapat memenuhi kewajiban finansial dan kewajiban pelayanan kepada masyarakatnya, saat ini dan di masa mendatang (Cohen *et al.*, 2012).

Beberapa penelitian empiris akuntansi terdahulu telah mengembangkan indikator *financial distress*. Rasio keuangan digunakan untuk memprediksi *financial distress* pada pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Sutaryo (2009) dan Cohen *et al.* (2012). Sutaryo (2009) menggunakan 18 (delapan belas) rasio yang terdiri dari rasio kinerja keuangan, rasio posisi keuangan, rasio efisiensi dan rasio hutang. Cohen *et al.* (2012) membuat sebuah model untuk mengevaluasi kelangsungan keuangan pemerintah kota setempat di Yunani yang dikembangkan atas dasar data keuangan akrual tahun 2007 dan menggunakan sejumlah rasio keuangan untuk memenuhi tujuan model tersebut. Sedangkan, Jones Walker (2007) dalam memprediksi *financial distress* pemerintah daerah di Australia menggunakan indikator keuangan dan non-keuangan yang meliputi estimasi biaya untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik, rasio-rasio keuangan, karakteristik dewan dan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah L/A, STL/R, DEBTREV, OR/OE, IGR, OE/R, PM, POP dan OPINI mampu memprediksi *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan keuangan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (PSAP No.1 Paragraf 9).

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari : (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat; (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan pokok pemerintah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

Financial Distress

Financial distress didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana perusahaan memiliki kesulitan membayar *financial obligations* kepada kreditur, berada dalam permasalahan kegiatan operasional dan penurunan kinerja keuangan yang signifikan serta terus-menerus sehingga dapat mengakibatkan kebangkrutan dan kerugian finansial bagi investor maupun kreditur (Xie *et.al* 2011; Habib, Bhuiyan dan Islam 2013; Platt dan Platt 2002). Jones dan Walker (2007) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kepada publik sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan ketidakterediaan dana untuk diinvestasikan pada infrastruktur yang digunakan dalam penyediaan pelayanan sehingga kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan.

Sutaryo (2009) mendefinisikan *financial distress* sebagai ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengembalikan baik pokok maupun bunga pinjaman. Definisi tersebut mengacu pada PP No.54 Tahun 2005 tentang pinjaman daerah yang kini telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2011. Indikasi kemampuan yang dimaksud dinyatakan dalam *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR). PP No. 30/2011 pasal 15 dan 16 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah jika memiliki tingkat DSCR paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan tersebut (memiliki tingkat DSCR < 2,5) maka dapat dinyatakan dalam status *financial distress*.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio (*ratio analysis*) mengekspresikan hubungan di antara data-data laporan keuangan terpilih. Hubungan ini diekspresikan dalam istilah persentase, tingkat, atau proporsi sederhana (Kieso *et al.* 2008: 222). Menurut Halim (2007: 231), analisis rasio keuangan bagi perusahaan swasta terdiri atas : (a) Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan segera; (b) Rasio leverage, yaitu rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemilik dengan dana yang dipinjam perusahaan dari kreditur; (c) Rasio aktivitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimiliki perusahaan; (d) Rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Rasio-rasio tersebut disusun untuk melayani pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, yaitu : para kreditur, pemegang saham ataupun pemilik perusahaan dan pengelola. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum terlalu banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Pengaruh Rasio Hutang terhadap Financial Distress

Pasaribu (2008) menyebutkan salah satu prediktor utama *financial distress* adalah hutang. Kebangkrutan biasanya diawali dengan terjadinya moment gagal bayar sehingga semakin besar jumlah hutang maka semakin tinggi probabilitas *financial distress*. Dalam penelitiannya, Pasaribu (2008) menggunakan enam kelompok rasio keuangan untuk memprediksi *financial distress* pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja likuiditas berpengaruh signifikan dalam memprediksi *financial distress*.

Beberapa penelitian pada sektor publik yang menggunakan rasio hutang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Cohen *et al* 2012 membuktikan bahwa rasio L/A (total kewajiban terhadap total aset) dan STL/R (total kewajiban jangka pendek terhadap pendapatan) dapat dijadikan sebagai indikator sebuah model untuk mengevaluasi kemampuan finansial pemerintah daerah di Yunani. Trussel dan Patrick (2009) menggunakan lima kategori faktor resiko dalam memprediksi *fiscal distress* di pemerintah daerah Pnnsylvania. Penelitian dilakukan dengan mengembangkan sebuah model untuk menghasilkan sekumpulan variabel dengan kemampuan prediktif yang relatif tinggi. Salah satu kategori faktor resiko adalah *debt usage* yang memiliki dua proksi yaitu DEBT dan DEBTREV (*debt to revenue*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DEBTREV tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal distress*.

Hutang pemerintah berupa pinjaman daerah merupakan alternatif pendanaan APBD. Jika dalam memenuhi kebutuhan layanan publik dana APBD terbatas maka langkah yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Ada dua alternatif hutang pemerintah yaitu bersumber dari pemerintah pusat dan pihak ketiga (lembaga keuangan bank maupun non bank). Berdasarkan hasil reuiu Sutaryo (2009) atas laporan keuangan pemerintah daerah menemukan bahwa hutang pemerintah sebagian besar dilakukan kepada pemerintah pusat, sedangkan pada pihak ketiga (lembaga keuangan bank) hutang pemerintah dilakukan dalam jumlah yang relatif kecil. Oleh karena hutang tersebut bersumber pada pemerintah pusat maka kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman dan bunga) menjadi lebih fleksibel tergantung jenis pinjaman yang dilakukan. Hal ini tentu berimplikasi pada besarnya jumlah hutang yang dilakukan pemerintah daerah sebagai alternatif pendanaan APBD dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Dengan

demikian, semakin tinggi hutang pemerintah maka semakin kecil probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*.

Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H₁ : *Total liabilities/total assets* (L/A) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*
- H₂ : *Short term liabilities/own revenue* (STL/R) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*
- H₃ : *Debt to revenue* (DEBTREV) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*

Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan terhadap Financial Distress

Rasio kinerja keuangan yang digunakan Cohen (2008) dan Sutaryo et al (2012) adalah *Operating Revenues to Operating Expenses ratio* (OR/OE). Rasio OR/OE yang rendah mengindikasikan bahwa pemerintah mempunyai pengeluaran yang tinggi sehingga pemerintah daerah berada dalam kondisi tidak efisien dan memiliki probabilitas untuk mengalami *financial distress*.

Pemerintah daerah menerima dana dari berbagai sumber termasuk pajak, hibah, *fee* dan denda. Pemerintah daerah yang mempunyai sedikit sumber pendapatan lebih rentan terhadap masalah keuangan karena tidak dapat bergantung pada sumber-sumber alternatif.. Hal ini mendorong Trussel dan Patrick (2009) untuk menguji *revenue concentration* karena pemerintah daerah harus mampu memanfaatkan sumber pendapatan alternatif agar terhindar dari kondisi *financial distress*. Dalam penelitiannya, *revenue concentration* memiliki dua proksi yaitu *taxes to revenues* (TAXREV) dan *inter-governmental revenues* (IGR). Hasil menunjukkan bahwa ketika IGR meningkat, resiko *fiscal distress* juga akan meningkat. Hal ini mendukung hipotesis penelitian bahwa lebih ketergantungan pada IGR dapat mengakibatkan *fiscal distress*, jika arus dana menyusut dan pemerintah daerah tidak dapat menemukan sumber pendanaan alternatif.

Cohen et al (2012) menambahkan *operating expenses to own revenues ratio* (OE/R) dalam menilai *financial distress*. OE/R merupakan perbandingan pengeluaran operasional terhadap pendapatan sendiri (PAD). Pemerintah daerah tidak dapat membiayai pengeluaran hanya dengan mengandalkan pendapatan sendiri sehingga harus menambahkan pemasukan keuangan dari subsidi pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio OE/R maka pemerintah daerah semakin bergantung pada subsidi sehingga dapat meningkatkan resiko keuangan yang dihadapi. Hal ini dikarenakan subsidi pemerintah merupakan salah satu parameter eskogen yang tidak dapat dikontrol secara langsung.

Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- H₄ : *Operating revenues to operating expenses ratio* (OR/OE) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*
- H₅ : *Inter-governmental revenues ratio* (IGR) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*

H6 : *Operating expenses to own revenues ratio* (OE/R) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*

Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Financial Distress

Sutaryo (2009, 2012) dan Cohen (2008) menggunakan *profit margin* (PM) sebagai rasio profitabilitas dalam analisisnya. Meskipun profitabilitas bukan tujuan utama di sektor publik, namun surplus sangat diperlukan agar pemerintah daerah memiliki cukup dana untuk membiayai investasi jangka panjang. Atau, pemerintah daerah bisa menghindari diperlukannya surplus dengan mengandalkan secara eksklusif pada hutang jangka panjang. Namun, tindakan ini bukan merupakan pendekatan yang memadai dan akan mempengaruhi solvabilitas. Dengan demikian, rasio profitabilitas memberikan refleksi dari efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan kemampuan manajemen untuk pertumbuhan keuangan. Berbeda dengan harapan di sektor swasta, nilai positif yang kecil dari rasio profitabilitas dapat dianggap sebagai hasil yang menguntungkan dan sebaliknya. Nilai-nilai negatif yang besar, terutama ketika terus-menerus, merupakan indikasi prospek keuangan yang tidak menguntungkan.

Sutaryo (2009) menggunakan surplus atau defisit anggaran dalam suatu periode untuk menghitung *Profit Margin* (PM) karena besar kecilnya jumlah surplus atau defisit menggambarkan jumlah selisih anggaran dengan realisasinya. Jika pemerintah daerah mempunyai saldo surplus yang tinggi mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut kurang atau tidak baik sehingga di tahun berikutnya tidak boleh mengajukan anggaran sebesar dari tahun sebelumnya dan surplus tersebut harus dikembalikan ke kas negara sehingga jumlah surplus yang tinggi tidak menjamin jika pemerintah daerah tersebut terhindar dari kesulitan keuangan. Semakin tinggi surplus anggaran maka semakin besar angka PM dan probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*.

Berdasarkan paparan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H7 : *Profit Margin* (PM) berpengaruh positif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*

Pengaruh Opini Audit BPK terhadap Financial Distress

Di Indonesia, opini audit telah digunakan pada beberapa literatur akuntansi pemerintahan. Rahmanti dan Prastiwi (2011) menyebutkan bahwa semakin banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang mendapatkan opini *disclaimer* berarti hal ini menunjukkan penurunan kualitas atas kinerja pemerintah daerah dalam melayani negara. Hariyati (2012) menemukan bahwa secara parsial opini audit berpengaruh terhadap anggaran pendapatan/belanja secara signifikan. Dengan dikeluarkannya pernyataan audit maka pemerintah daerah akan mempertimbangkan anggaran belanja yang akan disusun. Anggaran belanja yang ditekan maka secara tidak langsung akan mempengaruhi berkurangnya hutang pemerintah daerah.

Penelitian ini menduga bahwa semakin wajar opini audit maka semakin kecil probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* dikarenakan opini BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah dan tentunya akan berdampak pada

tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan. Jika investor semakin yakin dan berselera menanamkan sahamnya ke perusahaan/pemerintah maka pemerintah semakin mudah untuk mendapatkan pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan dana untuk menjalankan kelangsungan hidupnya (Marfiana 2013; Hariyati 2012).

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₈ : Opini audit BPK (OPINI) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*

Pengaruh Ukuran Daerah terhadap Financial Distress

Cohen (2008) menggunakan populasi sebagai faktor *macro-economic* dalam menilai kinerja keuangan pemerintah kota Yunani. Populasi merupakan *proxy* yang paling umum digunakan untuk ukuran pemerintah daerah. Berdasarkan analisis penelitiannya, populasi menunjukkan pengaruh pada nilai-nilai rasio keuangan dimana nilai tersebut merupakan tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menduga bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, cenderung tidak akan mengalami *financial distress*. Pemerintah dengan jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kepemilikan sumber daya yang lebih baik, sehingga terhindar dari *financial distress* (Syurmita, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₉ : Jumlah penduduk (POP) berpengaruh negatif terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*

METODE PENELITIAN

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel sesuai dengan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2008-2014 dan dipublikasikan dalam website BPK RI, yaitu www.bpk.go.id
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia melaporkan hutang jangka panjang
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia menyajikan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengukuran variabel penelitian.

Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diukur berupa satuan numeric (angka). Sedangkan, sumber dan pengumpulan datanya menggunakan data sekunder (*secondary data*) yang mengacu pada pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang sudah ada. Dalam hal ini, data diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seluruh

Indonesia melalui website BPK RI yaitu www.bpk.go.id, laporan statistik daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia melalui website Badan Pusat Statistik dan sumber lain yang terkait.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Pada penelitian ini, variabel dependen adalah probabilitas pemerintah daerah *non financial distress* dan pemerintah daerah *financial distress* yang diindikasikan dengan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) sebagaimana diatur dalam PP No. 30/2011 tentang pinjaman daerah, sebelumnya PP No. 54/2005. Berdasarkan PP No. 30/2011 tentang pinjaman daerah, DSCR dapat ditulis dengan formula dan ketentuan sebagai berikut :

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{P + B + BL}$$

Keterangan :

DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BD = Bagian daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, serta bagian daerah lainnya seperti dari pajak penghasilan perseorangan.

DAU = Dana Alokasi Umum

BW = Belanja Wajib adalah belanja pegawai dan belanja anggota DPRD

P = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan

B = Beban bunga pinjaman

BL = Biaya lain misalnya biaya administrasi, komitmen, provisi, asuransi dan denda yang terkait dengan pinjaman daerah

Ketentuan kelayakan pemberian pinjaman daerah ialah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua koma lima). Untuk pemerintah daerah yang mempunyai nilai $DSCR < 2,5$ (dua koma lima), maka dinyatakan mengalami *financial distress* dan dilambangkan dengan angka 0, sementara untuk pemerintah daerah yang mempunyai nilai $DSCR > 2,5$ (dua koma lima) dinyatakan dalam kondisi *non financial distress* dan dilambangkan dengan angka 1.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari faktor keuangan dan non-keuangan. Faktor keuangan direpresentasikan dengan nilai rasio dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio-rasio yang digunakan diambil dari penelitian Cohen (2008), Cohen *et al* (2012), Trussel dan Patrick (2009). Rasio-rasio tersebut kemudian dipilih dan disesuaikan dengan data serta informasi

yang tersedia dalam LKPD. Sedangkan faktor *non* keuangan direpresentasikan dengan faktor *macro-economic* (jumlah penduduk) dan opini audit BPK.

Variabel Rasio Hutang

Total liabilities/total assets (L/A), merupakan perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah aktiva. Untuk perhitungan variabel ini menurut Cohen *et al* (2012) adalah seperti berikut:

$$\frac{L}{A} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{total Assets}}$$

Short term liabilities/own revenue (STL/R), merupakan indikator likuiditas yang dihitung berdasarkan perbandingan antara kewajiban jangka pendek dan pendapatan sendiri (PAD). Formula yang digunakan menurut Cohen *et al* (2012) untuk menghitung

rasio ini sebagai berikut :

$$STL/R = \frac{\text{Short Term Liabilities}}{\text{Own Revenue}}$$

Debt to revenue ratio (DEBTREV), mengukur jumlah tahun pendapatan yang diperlukan untuk menutup hutang. Berikut formula rasio ini sebagaimana yang digunakan Trussel dan Patrick (2009).

$$DEBTREV = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Revenues}}$$

Variabel Rasio Kinerja Keuangan

Operating revenues to operating expenses (OR/OE), merupakan perbandingan antara umlah total pengeluaran operasional dengan jumlah total pendapatan operasional. Berikut formula rasio/ini seperti yang digunakan Cohen (2008)

$$OR/OE = \frac{\text{Total Operating Revenues} - \text{Subsidies}}{\text{Operating Expenses}}$$

Inter-governmental revenue ratio (IGR)

Trussel dan Patrick (2009) menghitung ketergantungan pada IGR sebagai pendapatan dari pemerintah dengan total pendapatan. Berikut formula yang dapat dirumuskan:

$$IGR = \frac{\text{Revenues from federal and State}}{\text{Total Revenues}}$$

Operating expenses to own revenues ratio (OE/R), merupakan perbandingan pengeluaran operasional terhadap pendapatan sendiri (PAD). Berikut formula yang dapat dirumuskan sebagaimana yang digunakan Cohen *et al* (2012) :

$$OE/R = \frac{\text{Operating Expenses}}{\text{Own Revenues}}$$

Variabel Rasio Profitabilitas

Profit Margin (PM), merupakan perbandingan antara surplus atau defisit anggaran dengan total pendapatan asli daerah. Menurut Sutaryo (2009), angka rasio ini menggambarkan kemampuan daerah dalam menutup jumlah belanja pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah yang diperoleh. Berikut formula rasio ini seperti yang digunakan oleh Cohen (2008)

$$PM = \frac{\text{Net Surplus (Deficit)}}{\text{Total Operating Revenues}}$$

Jumlah Penduduk

Populasi merupakan *proxy* yang paling umum digunakan untuk ukuran pemerintah daerah. Syurmita (2014) menyebutkan bahwa populasi penduduk suatu wilayah mencerminkan banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi menunjukkan kepemilikan sumber daya yang lebih baik sehingga terhindar dari *financial distress*. Variabel populasi penduduk (POP) pada penelitian ini menggunakan transformasi logaritma karena distribusi variabel ini *highly skewed* (sangat miring). Transformasi menghasilkan tingkat normalitas yang baik dan simetri dalam hal pendistribusian variabel tersebut (Cohen, 2008). Dengan demikian, populasi penduduk diukur sebagai berikut:

$$\text{Pop} = \text{Ln Populasi Penduduk}$$

Opini Audit BPK

Opini audit berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa yakni opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), opini tidak wajar (*adverse opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*). Variabel opini audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala ordinal sebagaimana yang digunakan Marfiana (2013). Skala ordinal merupakan skala yang ditunjukkan melalui sekelompok label atau nama yang mempunyai nilai relatif (mempunyai informasi pembeda peringkat) (Wahyuni 2014: 9).

Penentuan ranking variabel opini audit dalam penelitian ini sebagai berikut :

Opini Audit	Rangking
Wajar tanpa pengecualian (WTP)	5
Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DP)	4
Wajar dengan pengecualian (WDP)	3
Opini tidak wajar	2

Tidak menyatakan opini

1

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Data panel atau pooled data merupakan kombinasi dari data *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (silang waktu). Pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa keunggulan. Berikut adalah keunggulan data panel seperti yang disebutkan Gujarati dan Porter (2009: 592-593). Pertama, data panel memberikan data yang lebih informatif, lebih bervariasi, tingkat kolinieritas antarvariabel yang rendah, lebih besar *degree of freedom* dan lebih efisien. Kedua, dengan menganalisis data *cross-section* dalam beberapa periode maka data panel tepat digunakan dalam penelitian perubahan dinamis (*dynamic change*). Ketiga, data panel mampu mendeteksi dan mengukur pengaruh yang tidak dapat diobservasi melalui *data times series* atau murni data *cross section*. Keempat, data panel memungkinkan kita mempelajari model perilaku yang lebih kompleks seperti fenomena skala ekonomis dan perubahan teknologi. Kelima, data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat individu karena data yang diobservasi lebih banyak. Keenam, oleh karena data panel berhubungan dengan individu, perusahaan, kota, negara dan sebagainya sepanjang waktu (over time), maka akan bersifat heterogen dalam unit tersebut. Teknik untuk mengestimasi data panel dapat memasukkan heteroginitas secara eksplisit untuk setiap variabel individu secara spesifik.

Secara umum model data panel dapat dirumuskan sebagai berikut (Ghozali dan Ratmono, 2013) :

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + \mu_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = variabel dependen

X_{it} = variabel independen

i = entitas ke- i (unit *cross sectional*)

t = periode ke- t (tahun periode waktu)

Menurut Ajija *et al.* (2011) ada tiga macam model data panel yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE). Diantara ketiga model tersebut, langkah selanjutnya adalah memilih model data panel yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini dengan melakukan pengujian sebagai berikut:

- a) *Chow Test* digunakan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dan *Fixed Effect* (FE). Hipotesis yang digunakan dalam *Chow Test* ini adalah :

- 1) Jika H_0 diterima ($p\text{-value} > 5$ persen), maka model yang terpilih adalah *Pooled Least Square*.
 - 2) Jika H_0 ditolak ($p\text{-value} < 5$ persen), maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect*.
- b) *Hausman Test* digunakan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara *Fixed Effect* (FE) dan *Random Effect* (RE). Hipotesis yang digunakan pada *Hausman Test* adalah :
- 1) Jika H_0 diterima ($p\text{-value} > 5$ persen), maka model yang dipilih adalah *Random Effect*.
 - 2) Jika H_0 ditolak ($p\text{-value} < 5$ persen), maka model yang dipilih adalah *Fixed Effect*.
- c) *Lagrange Multiplier Test* digunakan untuk membandingkan *Pooled Least Square* (PLS) dan *Random Effect* (RE). Hipotesis yang digunakan dalam Uji LM adalah:
- 1) Jika H_0 diterima ($p\text{-value} > 5$ persen), maka model yang dipilih adalah *Pooled Least Square*.
 - 2) Jika H_0 ditolak ($p\text{-value} < 5$ persen), maka model yang dipilih adalah *Random Effect*.

HASIL PENELITIAN

Hasil Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa ketentuan yang telah dibahas sebelumnya. Setelah dilakukan identifikasi terhadap 3563 LKPD tahun 2008-2014 yang diterbitkan oleh BPK terdapat 2114 LKPD yang tidak menyajikan kewajiban jangka panjang dan 815 LKPD yang tidak menyajikan data secara lengkap sehingga hasil yang diperoleh sebanyak 634 LKPD sebagai sampel penelitian.

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif memberikan gambaran umum mengenai data penelitian yang dimiliki secara deskriptif. Nilai-nilai umum dalam statistik deskriptif meliputi rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Adapun analisis deskriptif penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
L/A	634	1,46E-05	0,152657	0,014015	0,018125
STL/R	634	-0,003573	16,78289	0,464961	1,271181
DEBTREV	634	5,67E-05	0,299184	0,032770	0,041825
OR/OE	634	0,001386	7,033382	0,132839	0,288264
IGR	634	0,022856	1,706058	0,869979	0,101551
OE/R	634	0,142179	62,02376	12,41627	8,739831
PM	634	-9,254268	12,82294	0,270079	1,399132
POP	634	10,95937	15,04389	13,17122	0,824483
OPINI	634	1	5	3,039432	0,928753

Sumber : pengolahan data Eviews, 2018

Pengujian Hipotesis

Sesuai bentuk data, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel yang diolah dengan bantuan *software* komputer yaitu *Eviews* versi 9. Langkah awal analisis data pada penelitian ini adalah dengan memilih salah satu dari tiga model data panel yaitu *Pooled Least Square*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Pemilihan model data panel dapat dilakukan dengan tiga uji yaitu *Chow Test*, *Hauman Test* dan *Lagrange Multiplier Test*. Ketiga pengujian tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Chow Test

Uji *Chow* digunakan untuk memilih model *Pooled Least Square* (PLS) dengan *Fixed Effect* (FE). Hasil uji *Chow* pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.999633	(170,454)	0.0000
Cross-section Chi-square	354.347481	170	0.0000

Sumber : pengolahan data Eviews, 2018

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa nilai *Prob. Cross-section* F sebesar 0,0000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* (FE) lebih tepat dibandingkan dengan model *Pooled Least Square* (PLS).

Hausman Test

Uji *Hausman* digunakan untuk memilih model *Fixed Effect* (FE) dengan *Random Effect* (RE). Hasil uji Hausman pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	16.299972	9	0.0609

Sumber : pengolahan data Eviews, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai *Prob. Cross-section random* sebesar 0,069 yang nilainya $> 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* (RE) lebih tepat dibandingkan dengan model *Fixed Effect* (FE).

Lagrange Multiplier Test

Uji LM digunakan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara *Pooled Least Square* (PLS) dan *Random Effect* (RE). Hasil uji Lagrange Multiplier pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	23.60430 (0.0000)	0.086851 (0.7682)	23.69115 (0.0000)

Sumber : pengolahan data Eviews, 2018

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa *Prob. Cross-Section* sebesar 0,0000 yang nilainya $< 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Random Effect* (RE) lebih tepat dibandingkan dengan model *Pooled Least Square* (PLS).

Setelah melakukan tiga pengujian yaitu *Chow Test*, *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test* maka model yang paling tepat untuk penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Model *Random Effect* adalah variasi dari estimasi *Generalized Least Square* (GLS) sehingga tidak perlu melakukan pengujian heterokedastisitas dan autokorelasi karena GLS merupakan salah satu teknik penyembuh regresi.

Setelah mendapatkan model yang tepat untuk melakukan estimasi regresi maka selanjutnya adalah melakukan estimasi regresi dengan menggunakan *Random Effect*

Model (REM). Berdasarkan olah data dengan Eviews 9 diperoleh diperoleh hasil regresi yang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi dengan Random Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.964935	0.168422	5.729277	0.0000
L_A	-1.530209	0.941402	-1.625458	0.1046
STL_R	-0.025229	0.009636	-2.618225	0.0091
DEBTREV	-0.279242	0.394664	-0.707546	0.4795
OR_OE	0.010659	0.022650	0.470593	0.6381
IGR	-0.037844	0.069923	-0.541220	0.5885
OE_R	0.001153	0.001159	0.995296	0.3200
PM	-0.024134	0.004673	-5.164281	0.0000
LOGPOP	0.001708	0.010857	0.157299	0.8751
OPINI	0.013927	0.007509	1.854681	0.0641
Weighted Statistics				
R-squared	0.176896	Adjusted R-squared	0.165025	
F-statistic	14.90068	Durbin-Watson stat	1.816108	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : pengolahan data Eviews, 2018

Berdasarkan hasil regresi di atas dapat dijelaskan bahwa apabila variabel-variabel independen (L/A, STL/R, DEBTREV, OR/OE, IGR, OE/R, PM, logPOP, OPINI) dianggap konstan maka akan meningkatkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 96,49%.

Koefisien regresi L/A diperoleh nilai sebesar -1,53 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan rasio L/A sebesar 1% maka akan menurunkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 153%. Koefisien regresi STL/R diperoleh nilai sebesar -0,025 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan rasio STL/R sebesar 1% maka akan menurunkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 2,5%. Koefisien regresi DEBTREV diperoleh nilai sebesar -0,279 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan rasio DEBTREV sebesar 1% maka akan menurunkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 27,9%.

Koefisien regresi OR/OE diperoleh nilai sebesar 0,011 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan rasio OR/OE sebesar 1% maka akan meningkatkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 1,1%. Koefisien regresi IGR diperoleh nilai sebesar -0,038 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan rasio IGR sebesar 1% maka akan menurunkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 3,8%. Koefisien regresi OE/R diperoleh nilai sebesar 0,0012 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan rasio OE/R sebesar 1% maka akan meningkatkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 0,12%. Koefisien regresi PM diperoleh nilai sebesar -0,024 artinya apabila terjadi peningkatan atau

kenaikan rasio PM sebesar 1% maka akan menurunkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 2,4%.

Koefisien regresi logPOP diperoleh nilai sebesar 0,0017 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% maka akan meningkatkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 0,17%. Koefisien regresi OPINI diperoleh nilai sebesar 0,014 artinya apabila terjadi peningkatan atau kenaikan opini audit BPK sebesar 1% maka akan meningkatkan probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress* sebesar 1,4%.

Berdasarkan tabel 5, koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai *R-squared* sebesar 0,177 menunjukkan bahwa 17,7% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sedangkan sisanya sebanyak 82,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Variasi yang terjadi pada variabel *financial distress* dijelaskan oleh variabel rasio hutang, rasio kinerja keuangan, rasio profitabilitas, jumlah penduduk dan opini audit BPK.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 3 variabel (rasio STL/R, PM dan OPINI) yang berpengaruh pada probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* dengan *p-value* lebih kecil dari *alpha* 1%, 5% maupun 10%. Sedangkan variabel lainnya yaitu rasio L/A, DEBTREV, OR/OE, IGR, OE/R, dan logPOP tidak berpengaruh pada probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* dengan *p-value* lebih besar dari *alpha* 1%, 5% maupun 10%. Berikut akan dibahas pengujian hipotesis untuk masing-masing variabel.

Variabel STL/R merupakan rasio hutang untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan pendapatan daerah. Rasio STL/R memiliki pengaruh signifikan (0,0091) terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami *financial distress*. Selain itu, rasio STL/R menunjukkan hubungan negatif (-0,025), artinya semakin tinggi rasio STL/R maka kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* semakin kecil. Pemerintah daerah harus memiliki pendapatan daerah yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah, utang pegawai, utang perhitungan pihak ketiga (PPK), tunggakan dan bunga pinjaman. Hasil ini didukung oleh penelitian Cohen *et al.* (2012), menunjukkan bahwa rasio STL/R berpengaruh signifikan terhadap prediksi *financial distress* di pemerintah daerah Yunani.

Variabel PM merupakan rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan daerah dalam menutup jumlah belanja pemerintah daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang diperoleh. Rasio PM memiliki pengaruh signifikan (0,000) terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Selain itu, rasio PM menunjukkan hubungan negatif (-0,024) artinya semakin tinggi rasio PM maka kemungkinan pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress* semakin kecil. Pemerintah daerah harus pandai dalam memanfaatkan potensi-potensi pendapatan yang ada di daerah secara optimal dan menimalisir belanja daerah khususnya belanja tidak langsung (belanja pegawai) sehingga pemerintah daerah tidak mengalami defisit dalam

APBD. Hasil ini didukung oleh penelitian Sutaryo *et al.* (2012) dan Noviandri (2014) menunjukkan bahwa rasio PM terbukti dapat digunakan dalam memprediksi status *financial distress*.

Variabel OPINI merupakan tolak ukur untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Variabel ini memiliki pengaruh signifikan (0,064) terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Selain itu, OPINI menunjukkan hubungan positif (0,014) artinya apabila opini audit dinyatakan selain wajar (tidak wajar atau disclaimer) maka kualitas kinerja pemerintah daerah sangat buruk dan berdampak pada citra instansi. Opini audit digunakan parlemen sebagai pengawasan sehingga opini buruk akan menjadi kendala ketika berbicara terkait penganggaran.

Sementara itu, untuk variabel L/A dan DEBTREV yang merupakan proksi rasio hutang mempunyai nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,105 dan 0,48 yang mengindikasikan bahwa rasio-rasio ini tidak berpengaruh pada probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Almilia dan Kristijadi (2013); Trussel dan Patrick (2009). Almilia dan Kristijadi (2013) menunjukkan bahwa rasio total hutang dibagi total aktiva (TLTA) tidak berpengaruh terhadap *financial distress* suatu perusahaan. Trussel dan Patrick (2009) menunjukkan bahwa DEBTREV (*debt to revenue*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *fiscal distress* di pemerintah daerah Pnnsylvania.

Nilai probabilitas untuk variabel OR/OE, IGR dan OE/R yang merupakan proksi rasio kinerja keuangan di atas tingkat signifikansi penelitian dengan nilai probabilitas masing-masing sebesar 0,64, 0,59 dan 0,32. Artinya, rasio-rasio kinerja keuangan tidak berpengaruh pada probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi yang ditandai dengan penurunan rasio OR/OE dan kenaikan rasio IGR serta OE/R berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah mengalami kondisi *financial distress* (Cohen, 2008; Trussel dan Patrick, 2009; Sutaryo *et al.*, 2012). Kabupaten/kota yang lebih makmur kurang mengandalkan subsidi pemerintah dikarenakan dapat memaksimalkan potensi daerah sebagai sumber pendanaan alternatif dalam memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

Variabel logPOP sebagai faktor *macro-economic* dan proksi dari ukuran daerah memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi penelitian yaitu sebesar 0,88 sehingga ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk suatu daerah tidak berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah untuk mengalami *financial distress*. Hasil penelitian ini gagal mendukung hipotesis terakhir dan tidak sejalan dengan hasil penelitian Syurmita (2014) dan Cohen (2008) yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki jumlah penduduk yang besar, tidak akan mengalami *financial distress*.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah rasio keuangan, ukuran daerah dan opini audit yang dikeluarkan BPK mampu memprediksi financial distress pemerintah daerah di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang mempublikasikan LKPD di website BPK. Dalam penelitian ini dikemukakan sembilan variabel yang diharapkan mampu memprediksi financial distress pemerintah daerah yaitu rasio L/A, STL./R, DEBTREV, OR/OE, IGR, OE/R, PM, POP dan OPINI. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan, variabel-variabel tersebut dikatakan berpengaruh signifikan jika nilai signifikansi kurang dari alpha 1%, 5% maupun 10%. Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa variabel yang mampu memprediksi *financial distress* adalah rasio STL./R, PM dan Opini. Sedangkan keenam variabel lainnya yaitu rasio L/A, DEBTREV, OR/OE, IGR, OE/R dan POP tidak mampu memprediksi *financial distress*.

Adapun beberapa keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti adalah (1) tidak mengeluarkan LKPD dengan opini *adverse* (tidak wajar) dan *disclamer* dari sampel penelitian karena memiliki kualitas informasi keuangan yang kurang baik; (2) tidak membedakan sampel berdasarkan kriteria tertentu seperti lokasi pemerintahan dan status daerah yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Saran yang diberikan pada peneliti berikutnya adalah hanya menggunakan LKPD dengan opini yang menjamin kualitas informasi yang diberikan dan menambah variabel lokasi pemerintahan dan status daerah yang bisa dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian agar hasilnya tidak dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- ACIR. 1985. *The States and Distressed Communities: The Final Report*. Washington D.C. Ajiya, Choichrul R; Dyah W. Sari; Rahmat H. Setianto; dan Martha R. Primanti. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EVIEWS*. Jakarta : Salemba Empat.
- Almilia, Luciana Spica dan Kristijadi. 2003. Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *JAAI*. Vol. 7, No. 2 page 63-77
- Cohen, Sandra. 2008. Identifying the Moderator Factors of Financial Performance in Greek Municipalities. *Financial Accountability & Management*. 24 (3), 267-4424
- _____, Michael Doumplos, Evi Neofytou dan Constantin Zoppounidis. 2012. Assessing Financial Distress Where Bankruptcy is Not An Option: An Alternative Approach for Local Municipalities. *European Journal of Operational Research*. page 270-279
- Ghozali, Imam dan Dwi Ratmono. 2008. *Analisis Multivariate dan Ekonometirka : Teori, Konsep dan Aplikasi dengan EVIEWS 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar N. Dan Dawn C. Porter. 2009. *Basic Econometrics*. Fifth Edition. New York : Mc Graw-Hill International Edition.
- Habib, Ahsan., Md. Borhan Uddin Bhuiyan dan Ainul Islam. 2013. Financial Distress, Earning Management and Market Pricing of Accrual During the Global Financial Crisis. *Managerial Finance*. Vol. 39, No. 2 page 155-180
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Hariyati, Tri Retno. 2012. Faktor Determinan atas Hutang Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagai Variabel Antara. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol.3 No.3 Hlm. 368-379

- https://id.wikipedia.org/wiki/Opini_Badan_Pemeriksa_Keuangan diakses pada tanggal 17 Januari 2016 pukul 10.54 WIB
- Jones, Stewart dan R.G. Walker. 2007. Explanators of Local Government Distress. *ABACUS*. Vol. 43, No. 3 page 396-417
- Kieso, Donald E., Jerry J. Weygandt dan Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi ke-12, Jilid 1. Jakarta : Erlangga
- Marfiana, Nandhya. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota Pulau Jawa Tahun Anggaran 2011)*. Skripsi Universitas Sebelas Maret
- Noviandri, Tio. 2014. Peranan Analisis Rasio Keuangan dalam Memprediksi kondisi Financial Distress Perusahaan Sektor Perdagangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2, No.4. Universitas Negeri Surabaya
- Pasaribu, Rowland Bismark Fernando. 2008. Penggunaan Binary Logit untuk Prediksi Financial Distress Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta (Studi Kasus Emiten Industri Perdagangan). *Jurnal Ekonomi Bisnis & Akuntansi Ventura*. Vol. 11, wwwNo. 2
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009) tentang Penyajian Laporan Keuangan
- Plat, Harlan D. dan Marjorie B. Plat. 2002. Predicting Corporate Financial Distress: Reflections on Choice-Based Sample Bias. *Journal of Economics and Finance*. Vol 26, No. 2, page 184-199
- Prayitno, Hadi. 2012. Birokrasi tambun : 291 daerah habiskan separuh lebih APBD untuk belanja pegawai. Diakses tanggal 15 Oktober 2015.
<http://seknasfitra.org/pressrelease/birokrasi-tambun-291-daerah-habiskan-separuh-lebih-apbd-untuk-belanja-pegawai/>
- Rahmanti, Virginia Nur dan Arum Prastiwi. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Beropini Disclaimer. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Vol.2 No.2 Hlm. 186-368
- Surtikanti. 2013. Permasalahan Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Majalah Ilmiah UNIKOM*. Vol. 11, No.1
- Sutaryo. 2009. *Nilai Relevan Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta
- _____, Bambang Sutopo dan Ramawati. 2012. Relevansi Informasi Laporan Keuangan Cash Modified Basis : Kemampuan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin, 20-23 September
- Syurmita. 2014. Prediksi Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram, 24-27 September
- Trussel, John M dan Patricia A. Patrick. 2009. A Predictive Model of Fiscal Distress in Local Governments. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. 21 (4), page 578-616
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahyuni, Salamah. 2014. *Statistik Ekonomi dan Bisnis*. Cetakan 1. Surakarta: UNS Press
- Xie, Chi., Changqing Luo dan Xiang Yu. 2011. Financial Distress Prediction Based on SVM and MDA Methods: The Case of Chinese Listed Companies. *Quality & Quantity*. 45 (3), page 671-686